

## **BAB 2**

### **LATAR BELAKANG LAHIRNYA PLEDOI INDONESIA MENGGUGAT**

#### **2.1 Kebijakan Politik-Hukum Gubernur Jenderal dan Dinamika Pemerintahan Kolonial (1909-1931)**

Periode pemerintahan kolonial di Hindia Belanda ditandai dengan adanya pergeseran orientasi politik dari eksploitatif menuju arah reformasi terbatas melalui adanya politik etis. Perubahan tersebut merupakan cerminan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para Gubernur Jenderal. Kebijakan-kebijakan mereka tidak hanya mencerminkan dinamika politik kolonial Belanda melainkan menjadi latar belakang yang penting dalam memahami lahirnya wacana hukum nasional di Hindia Belanda.

Alexander Idenburg dikenal sebagai salah satu Gubernur Jenderal yang secara aktif mengimplementasikan prinsip Politik Etis, khususnya pada bidang pendidikan dan industri. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Idenburg dipengaruhi oleh kondisi krisis ekonomi Eropa dan kebutuhan kapitalis ekonomi di Hindia Belanda. Salah satu inisiatif pentingnya adalah dengan membentuk komite industrialisasi yang bertugas dalam mencari komoditas lokal yang dapat dikembangkan menjadi sebuah produk industri.<sup>22</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Idenburg membuahkan hasil berupa berdirinya beberapa pabrik, seperti pabrik kertas, sabun dan lilin. Meskipun hasilnya tidak signifikan, proyek ini menunjukkan upaya awal dalam pembentukan basis

---

<sup>22</sup> A. Budiantoro, Politik Etis dan Transformasi Sosial Masyarakat Pribumi di Hindia Belanda, *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 15(2), 2020, hlm. 12.

industri nasional oleh pemerintah kolonial. Hal ini menjadi salah satu pijakan penting dalam pembangunan ekonomi mandiri pada masa yang akan datang.<sup>23</sup>

Selain kebijakan ekonomi, Idenburg juga mengambil langkah berani dalam mengakui eksistensi Sarekat Islam. Pengakuan ini menjadi awal pertanda akan adanya keterlibatan politik organisasi pribumi dengan sistem hukum kolonial, meskipun batasan yang dibuat cukup ketat. Sikap Idenburg memberikan cerminan dalam pendekatan kolonial dari represif menuju akomodatif terbatas.<sup>24</sup> Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Idenburg menunjukkan adanya usaha pemerintah kolonial dalam memperkuat kontrol melalui strategi-strategi pembangunan dan integrasi terbatas antara bumiputera ke dalam sistem kolonial.

Keaktifan Idenburg dalam mempraktikkan Politik Etis terlebih melalui kebijakan hukum dan politiknya melalui penyusunan kerangka konstitusional awal Hindia Belanda melalui dorongan pembentukan Volksraad sebagai bentuk partisipasi rakyat yang terbatas melalui simbol sistem hukum kolonial. Idenburg terlibat dalam penyusunan peraturan yang membuka ruang bagi keterlibatan golongan elit bumiputera dalam dewan perwakilan, meskipun fungsi legislatif Volksraad tetap dipantau secara ketat oleh pemerintah kolonial.<sup>25</sup>

Idenburg dalam ranah hukum memperkuat struktur hukum dualisme yang membedakan antara Bumiputera, Timur Asing dan Eropa. Idenburg mengesahkan berbagai ketentuan yang memperketat kebebasan berserikat, namun tetap mengakui keberadaan Sarekat Islam sebagai organisasi yang legal. Pengakuan ini kemudian

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>25</sup> Nick Efthymiou, *The First World War and Constitutional Law for the Netherlands Indies*, *Erasmus L. Rev.*, 7, 54, hlm. 5-6.

menunjukkan ketidakpastian kolonial dimana akomodasi terbatas terhadap tuntutan lokal akan tetapi tetap dalam kerangka hukum kolonial yang ketat.<sup>26</sup> Idenburg memperketat pengawasan terhadap media cetak melalui ketentuan hukum pers yang secara efektif membatasi penyebaran opini anti-kolonial.

Secara politis, Idenburg menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial serta parlemen liberal untuk melaksanakan reformasi administratif, akan tetapi Idenburg tetap menjaga sistem kekuasaan Gubernur Jenderal sebagai penguasa. Idenburg mengatur pembentukan komiter Industrialisasi guna mengatasi krisis ekonomi pasca Perang Dunia I, yang diarahkan dalam memperkuat ekonomi Hindia Belanda. Akan tetapi, upaya tersebut tetap dibingkai melalui prinsip kekuasaan pusat kolonial, bukan sebagai usaha otonomi lokal.<sup>27</sup>

Van Limburg Stirum (1916-1921) kemudian melanjutkan berbagai kebijakan reformasi dari pendahulunya, akan tetapi dengan menekankan pada stabilitas pemerintahan dan integrasi politik terbatas. Van Limburg berusaha memodernisasi administrasi kolonial melalui pembentukan departemen energi dan pemindahan ibu kota pemerintahan ke Bandung, yang dinilai lebih aman dan strategis.<sup>28</sup> Van Limburg mendorong efisiensi birokrasi dan memperkuat pengawasan terpusat melalui departemen dan badan teknis.

Penguatan terhadap sistem ordinansi kolonial memberikan wewenang besar kepada Gubernur Jenderal dalam menindak gerakan politik. Van Limburg mendirikan Politieke Inlichtingen Dients (PID) yang berfungsi sebagai lembaga

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>28</sup> H. J. Benda, The pattern of administrative reforms in the closing years of Dutch rule in Indonesia, *The Journal of Asian Studies*, 25(4), 589-605, 1966, hlm. 470.

intelijen dalam mengawasi dan menindas aktivitas politik bumiputera. Aktivitas ini menandai pergeseran fungsi hukum dari sekadar alat keadilan menjadi alat kontrol kekuasaan kolonial. Hukum dalam masa pemerintahannya sangat dipolitisasi dan diarahkan guna meredam semangat nasionalisme yang berkembang.<sup>29</sup>

Van Limburg dalam bidang politik mendorong pembentukan Volksraad sebagai badan perwakilan, akan tetapi tetap bersifat konsultatif. Volksraad pada masa ini tidak memiliki kewenangan legislatif yang nyata. Kebijakan politik ini memberikan cerminan akan strategi kolonial dalam menyalurkan tuntutan lokal secara simbolik, sekaligus menghindari konfrontasi langsung. Hukum dan politik pada masa Limburg dirancang untuk menciptakan stabilitas tanpa memberikan kekuasaan substantif kepada pribumi.<sup>30</sup>

Dirk Fock (1921-1926) menandai perubahan haluan dari reformasi kearah konservatif kolonial. Dirk Fock menghapuskan lembaga penasihat bumiputera yang mana menjadi sebuah langkah yang dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dalam Politik Etis.<sup>31</sup> Langkah ini kemudian mempertegas posisi hukum kolonial sebagai perangkat dominasi yang tidak memberikan ruang bagi keterlibatan politik pribumi.

Pengaktifan kembali ketentuan darurat dilakukan oleh Dirk Fock guna menekankan gerakan politik termasuk penyebaran selebaran, diskusi terbuka dan kegiatan organisasi nasionalis. Sistem hukum pidana dimanipulasi guna membungkam suara-suara kritis terhadap kolonialisme. Praktik ini kemudian

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 472.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 474.

<sup>31</sup> A. Fischer, *Colonialism, Context and Critical Thinking: First steps toward decolonizing the Dutch legal curriculum*, *Utrecht Law Review*, 18(1), 2022, hlm. 53.

menjadi tanda bahwa hukum bukanlah instrumen keadilan melainkan sebagai alat dalam melenggangkan kekuasaan sepihak.<sup>32</sup> Secara politik, Dirk Fock sangat bimbang terhadap gagasan demokratisasi kolonial. Dirk Fock membatasi anggaran pendidikan dan memperketat seleksi pegawai bumiputera di instansi pemerintahan. Akibatnya koalisi terhadap golongan elite pribumi serta tumbuhnya radikalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap struktur politik yang menutup rapat pintu partisipasi.<sup>33</sup>

De Graeff (1926-1931) berusaha menghidupkan kembali kebijakan moderat dengan memberikan ruang legal bagi organisasi-organisasi politik nasionalis.<sup>34</sup> De Graeff memisahkan penanganan organisasi politik dari penindakan terhadap komunisme, membuka kembali kesempatan bagi diskursus politik bumiputera. Akan tetapi, tetap memberikan batasan yang sangat ketat terkhusus pada aktivis politik yang dianggapnya mengganggu ketertiban umum.

Penyeimbangan antara hukum represif dan reformasi administratif dilakukan oleh De Graeff. Dukungan terhadap reformasi pendidikan hukum dan memperluas akses pendidikan tinggi bagi bumiputera. Meskipun sistem peradilan masih menindas melalui dualisme hukum, hal ini menegaskan bahwa reformasi pada masa De Graeff tidak menyentuh substansi sosial melainkan hanya administratif.<sup>35</sup>

Pengaktifan kembali Volksraad melalui kekuasaan yang lebih besar dalam konsultasi administratif dilakukan oleh De Graeff, akan tetapi tidak mengikat

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>34</sup> C. Fahmi, P. T. Stoll, S. Shabarullah, M. Rahman & S. Syukri, *The State's Business Upon Indigenous Land in Indonesia: A Legacy from Dutch Colonial Regime to Modern Indonesian State*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 8(3), 1566-1596, 2024, hlm. 153.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 155.

pemerintah kolonial. De Graeff melakukan pengasingan terhadap aktivis komunis dan nasionalis radikan ke Boven Digul yang menunjukkan batas liberalisme kolonial. Upaya kompromi De Graeff memperlihatkan dinamika antara keinginan reformasi dan ketakutan terhadap instabilitas politik akibat tuntutan kemerdekaan.<sup>36</sup>

## 2.2 Pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926-1927

Paham komunis mulai masuk ke Hindia Belanda pada abad ke-20 melalui H. J. F. M. Sneevliet yang merupakan pemimpin buruh negeri Belanda. Sneevliet merupakan anggota *Sociaal Democratische Arbeiderspartij* (SDAP). SDAP<sup>37</sup> merupakan partai pekerja sosial demokrat yang berdiri pada tahun 1894 di Amsterdam. Ketertarikannya pada permasalahan rakyat Hindia Belanda membuat partai ini menentang dengan tegas penindasan serta kekerasan yang dilakukan oleh Belanda dalam upaya memperluas wilayah jajahannya. Partai ini berdiri atas dasar kepeduliannya terhadap rakyat Hindia Belanda sehingga kampanye-kampanye yang dilakukan adalah guna membela kemajuan rakyat Hindia Belanda dan mengupayakan peningkatan standar hidup rakyat Hindia Belanda.

Sneevliet datang ke Hindia Belanda dan bekerja pada surat kabar *Soerabajaasch Handelsblad* sebagai anggota staf redaksi, yang kemudian pada tahun 1913 menjadi sekretaris *Semarangse Handelsblad* di Semarang. Semarang menjadi tempat yang cukup menguntungkan bagi Sneevliet karena merupakan pusat dari serikat buruh tertua di Hindia Belanda dan dikenal dengan nama *Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP). Serikat buruh ini merupakan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>37</sup> *Sociaal Democratische Arbeidersparti*, selanjutnya akan ditulis dengan SDAP.

perkumpulan yang sudah tertata dengan sangat rapih, sehingga Sneevliet yang sudah cukup mahir dalam memimpin sebuah perkumpulan sosialis akhirnya membawa VSTP<sup>38</sup> ke arah yang lebih radikal. Sneevliet beserta rekan-rekan sosialisnya seperti J.A. Brandsteder, Bergsma dan H.W. Dekker, mendirikan sebuah organisasi bernama *Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV) dan menerbitkan majalah bernama *Het Vrije Woord* bersama Adolf Baars dan Bergsma.<sup>39</sup>

Jauh sebelum datangnya Sneevliet ke Hindia Belanda, gerakan untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda sudah dilakukan sejak tahun 1900. Gerakan ini kemudian melahirkan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang diantaranya seperti organisasi Boedi Oetomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1905) yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (1912), *Nationale Indische Partij* (1912), Muhammadiyah (1912) dan Sosial Demokratis Hindia (ISDV) pada tahun 1914.<sup>40</sup>

*Indische Sociaal-Democratische Vereniging* (ISDV) berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920 atas pimpinan Semaoen. Peran Partai Komunis Indonesia dibidang politik semakin kuat atas campur tangan Musso, Darsono dan Alimin. Partai Komunis Indonesia (PKI) menggunakan Al-Quran, hadist hingga ramalan Joyoboyo dan Ratu Adil dalam melancarkan aksinya guna mendapatkan kepercayaan dari rakyat di berbagai daerah di Hindia Belanda, hingga

---

<sup>38</sup> *Vereniging van Spoor en Tramweg Personel*, selanjutnya akan ditulis dengan VSTP.

<sup>39</sup> Yunani Hasan, *Indische Sosial Democratische Vereniging* (ISDV), Merupakan Cikal Bakal Partai Komunis Indonesia (PKI), Jurnal Vol. 3 No. 5, 2014, hlm. 6.

<sup>40</sup> Anwar Hafid, *Sejarah Pendidikan (Suatu Kajian Perbandingan antara Pendidikan Nasional dan Pendidikan di Beberapa Negara)*. Kendari: Unhalu Press, 2013, hlm. 96.

akhirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) mampu memperluas cabangnya hingga ke wilayah Sumatera seperti Aceh dan Minangkabau, wilayah Makassar, Bali, Lombok hingga Ternate.<sup>41</sup>

Perluasan cabang dari Partai Komunis Indonesia (PKI) kemudian dihimpun dalam organisasi bernama Sarekat Rakyat, dengan tujuan awal guna melatih dan menjadi sebuah persiapan awal bagi calon-calon yang didominasi oleh para petani ini untuk naik menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam ajaran komunis, serikat dagang lebih penting sehingga tahun 1924 Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat keputusan yang cukup berani untuk melepas Sarekat Dagang untuk meningkatkan kekuatannya dalam sebuah gerakan buruh.

Keputusan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam melepas Sarekat Islam membuat partai ini kehilangan banyak pengikut, hal ini terjadi karena Sarekat Islam didominasi oleh para petani yang menentang adanya gerakan buruh. Kemunduran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu tidak hanya didasari oleh penurunan jumlah pengikutnya, banyak organisasi nasionalis yang memberikan penawaran untuk bekerjasama dalam menyatukan kekuatan, akan tetapi mendapatkan penolakan dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Kabar kemunduran para petani dan penolakan dalam bersatu dengan organisasi nasionalis ini terdengar sampai pada para pemimpin komunis di Moskow, berita ini menimbulkan kemarahan para pemimpin komunis karena dinilai dengan hal tersebut Partai Komunis Indonesia (PKI) gagal dalam merebut kekuasaan berpolitik.

---

<sup>41</sup> Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm. 364.



Menyadari kesalahannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kongres pada tahun 1924 dengan tujuan untuk membangun kembali Sarekat Rakyat. Pembentukan organisasi-organisasi lainnya juga mulai dibentuk, pada saat yang bersamaan Partai Komunis Indonesia (PKI) mempertimbangkan kaum perempuan untuk masuk dalam perhimpunannya. Hal tersebut membuat Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali mendapatkan pengikutnya, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki banyak cabang organisasi dengan anggota yang banyak, namun pengurus inti yang sedikit sehingga membuat partai ini kesulitan dalam mengontrol massanya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa wilayah cabang Sarekat Rakyat berinisiatif melakukan teror-teror atas Partai Komunis Indonesia (PKI) sehingga menimbulkan gerakan anti komunis dikalangan masyarakat penganut agama Islam sehingga berdampak pada semakin kerasnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya, Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali menggelar kongres pada Desember 1924 dengan hasil menyatukan Sarekat Islam dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tahun 1925 Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pertemuan di Yogyakarta atas pimpinan Alimin. Pertemuan ini membahas mengenai pemberontakan yang akan dilangsungkan pada tahun 1926 dengan diawali aksi pemogokan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Merasa menjadi partai terbesar pada masa itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) merasa mampu dalam meluncurkan sebuah pemberontakan yang menjadi petaka bagi para aparat di

Hindia Belanda. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dikenal dengan “Pemberontakan 1926” terjadi pada saat pemimpin partai tersebut sedang tidak berada di lokasi. Pemimpin-pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) diantaranya Sugono, Budi Sutirto, Sardjono dan beberapa pemimpin lainnya.

Pemberontakan ini berlangsung atas persetujuan sebagian cabang, sedangkan beberapa cabang lainnya tidak menyetujui adanya pemberontakan ini karena merasa bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) belum mampu dalam melakukan pemberontakan. Tan Malaka selaku wakil Komintern Asia Timur berpendapat bahwa pemberontakan itu tidak akan pernah berhasil jika massa tidak siap. Alimin yang pada saat itu menjadi pemimpin dalam pemberontakan tidak menggubris adanya pendapat-pendapat yang menentang pemberontakannya dan tetap melanjutkan aksinya.

Pemberontakan berlangsung pada tanggal 12 November 1926 diberbagai wilayah. Di Batavia, para buruh kereta api berencana untuk melangsungkan pemogokan pada tanggal 13-14 November 1926. Di Keresidenan Banten, terjadi pemberontakan pada tanggal 12 November hingga 5 Desember 1926. Sebanyak 300 pemberontak menyerang polisi yang bertugas dengan melakukan penembakan serta penyerangan terhadap barak polisi.<sup>42</sup> Kabupaten Bandung melangsungkan pemberontakannya pada tanggal 12-18 November 1926 yang terbagi di wilayah Nagreg, Padalarang, Cimahi dan Rancaekek. Di Priangan Timur, pemberontakan terjadi di wilayah Tasikmalaya-Ciamis dengan melakukan sabotase pada jalur

---

<sup>42</sup> Ruth McVey, *Kemunculan Komunisme Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2009, hlm. 595.

komunikasi serta penyerangan dengan melakukan pembakaran oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 12 November 1926.

Keresidenan Suwakarta tidak lepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), tepatnya di wilayah Kabupaten Boyolali, pemberontakan dimulai sejak tanggal 17-23 November 1926, Kediri pada tanggal 12 November hingga 15 Desember 1926. Wilayah Banyumas, Kedu dan Pekalongan juga menjadi wilayah terdampak oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Melihat kekacauan yang terjadi diberbagai wilayah, Jaksa Agung memerintahkan untuk menangkap seluruh anggota komunis. Atas perintah Jaksa Agung, penangkapan secara besar-besaran digencarkan dan pemberontakan yang terjadi dapat dihentikan dengan cepat sehingga pada akhir bulan Desember pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat dihentikan meskipun kekacauan yang diperbuat masih berlangsung selama beberapa hari.

Tidak membutuhkan waktu lama, selang beberapa hari setelah penangkapan masal, pemberontakan terjadi di wilayah Sumatera pada tanggal 1 Januari 1927. Pemberontakan ini berlangsung di wilayah Sumatera Barat tepatnya di Lubuk Sikaping, Painan, Pariaman, Kota Lawas, Solok, Silungkang dan Sawahlunto.<sup>43</sup>

Aksi pembakaran rumah-rumah milik pegawai pemerintahan Kolonial Belanda dilakukan di wilayah Tanjung Ampulu pada tanggal 1 Januari 1927. Pemberontakan lainnya terjadi di wilayah Padang Siberuk dengan aksi pembunuhan terhadap

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 597.

kepala nagari serta beberapa penduduk yang dianggap sebagai antek-antek Belanda. Markas besar kaum pemberontak yang berada di Silungkang, dijadikan sebagai tempat pembunuhan terhadap pejabat militer Belanda serta beberapa guru agama dan pengrajin emas yang bekerja untuk Belanda. Pemberontakan yang terjadi di wilayah Sumatera jauh lebih berat dibandingkan dengan di wilayah Jawa, akan tetapi pemberontakan di Sumatera dapat diredamkan pada tanggal 4 Januari 1927.

Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dihentikan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Kegagalan dalam pemberontakan ini disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang dan komunikasi antar anggota yang belum terjalin dengan baik. Pemberontakan ini berhasil diberhentikan dengan penangkapan massal para pemberontak. Sebanyak 13.000 pemberontak diamankan, beberapa lainnya ditembak karena melakukan penghilangan nyawa. 5000 orang ditahan, 4.500 orang ditahan setelah diadili dipengadilan, 6.700 orang diinterogasi dan dibebaskan, serta 1.300 pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI), Serikat Buruh dan Sarekat Rakyat dikirim ke Boven Digul di Irian Barat.

### **2.3 Perjalanan Politik Partai Nasional Indonesia tahun 1927-1929**

Gagalnya pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1926-1927 menjadi langkah awal pembentukan partai baru guna mewadahi penyaluran aspirasi rakyat Hindia Belanda terhadap pemerintah yang berwenang. Para tokoh pejuang bangsa tidak tinggal diam dalam menanggapi kekosongan tersebut. Sukarno sebagai salah satu tokoh pejuang bangsa mencetuskan sebuah ideologi yang berbunyi “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” atau lebih dikenal dengan sebutan Nasakom, kemudian menjadi

pendorong Sukarno dalam membentuk sebuah organisasi politik.<sup>44</sup> Dalam merealisasikan pembentukan organisasi politik, tokoh politik bangsa mengadakan beberapa kali pertemuan dalam rentang bulan Maret – Mei 1927 dengan dihadiri beberapa tokoh penting seperti Sukarno, Soenarjo, Soedjadi, Tilaar, Tjipto Mangoenkoesoemo, Boediarto dan Ishaq, dengan hasil didirikannya sebuah organisasi politik pada tanggal 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI) Setelah kongres pertamanya.<sup>45</sup>

Berdirinya partai ini didasari oleh dua faktor. Pertama, hancurnya dinasti Hohenzollern di Jerman, akhirnya menimbulkan sebuah revolusi yang kemudian membuat Belanda semakin lemah. Melihat Belanda kian melemah membuat rakyat Hindia Belanda kemudian bergerak atas dasar rasa nasionalismenya guna memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Belanda yang menyadari kelemahannya, akhirnya bersiasat untuk mengambil kembali hati dari bangsa-bangsa jajahannya. Berbagai cara telah dilakukan, termasuk menjanjikan hak-hak berpolitik yang jauh lebih luas serta memiliki kebebasan serta kemerdekaan berpendapat di rapat-rapat umum serta di Dewan Rakyat.<sup>46</sup>

Hindia Belanda lagi-lagi harus merasakan dikhianati oleh janji-janji yang berikan oleh Belanda. Diangkatnya Gubernur Jenderal Dirk Fock membuat rakyat Hindia Belanda semakin tertindas dan kehilangan hak-hak yang telah diberikan.

---

<sup>44</sup> R. P. Soejono dan R. Z. Leirissa, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (1900-1942)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm. 366.

<sup>45</sup> Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 2: Sejarah Pergerakan Nasional – Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020, hlm. 186.

<sup>46</sup> Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018, hlm. 94.

Fock membuat undang-undang yang menyebabkan berkurangnya kebebasan bagi Hindia Belanda. Jikalau ada rakyat Hindia Belanda yang menyuarakan pendapatnya yang bertolak belakang dengan kebijakan Belanda maka harus bersiap untuk masuk penjara. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Fock membuat rakyat Hindia Belanda dipenjara dan diasingkan tanpa diadili terlebih dahulu.

Faktor kedua, Gubernur Jenderal Dirk Fock kemudian digantikan oleh De Graeff. Kebijakan yang dikeluarkan semakin tidak masuk akal, sementara rakyat Hindia Belanda sudah terdesak untuk melepaskan kerangkeng jajahan Belanda. Tidak ada satu partai pun yang kuat, Sarekat Islam terpecah, Tjokroaminoto semakin lemah, sisanya masuk dalam Sarekat Rakyat. Tahun 1926, Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan revolusi fisik untuk kemerdekaan dan komunisme. Pemberontakan ini mengalami kegagalan akibat dari kurang matangnya persiapan. Akibatnya Partai Komunis Indonesia dan Sarekat Rakyat ditanggihkan.

Tanggal 4 Juli 1927, berdiri sebuah partai dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) atas dukungan enam orang dari *Algemeene Studieclub*. Tujuan dari berdirinya partai ini adalah kemerdekaan sepenuhnya. Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) bergerak secara radikal dan berani dalam melawan segala hal yang menyengsarakan rakyat. Radikalnya pergerakan partai ini tidak lepas dari kritik anggota partainya sendiri, hal ini dinilai terlalu bahaya bagi partai yang baru berdiri.

Berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) awalnya menimbulkan kecurigaan dari pihak Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda beranggapan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) ini merupakan kelanjutan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sebelumnya telah menimbulkan kekacauan dengan

melakukan pemberontakan pada tahun 1926-1927. Akan tetapi, Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki ideologi yang jauh berbeda. Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan organisasi yang bergerak *dibidang* politik nasionalis yang menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan guna memperoleh bangsa Hindia Belanda yang merdeka dari penjajahan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah dengan mendirikan Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tanggal 18 Desember 1927, selang lima bulan setelah terbentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) ini.

Sukarno sebagai pemimpin dari Partai Nasional Indonesia (PNI) secara tegas menyatakan tidak takut melawan berbagai bentuk kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang merugikan rakyat Hindia Belanda. Sebagai organisasi yang bergerak *dibidang* politik, Partai Nasional Indonesia (PNI) mengadakan pertemuan guna membahas mengenai program-program yang akan dilaksanakan serta mengganti beberapa struktur kepengurusan. Tanggal 28-30 Mei 1928, merupakan kongres pertama yang dilaksanakan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) di Surabaya. Rapat yang diadakan di Gedung *Stadstuin Theater* ini terbagi menjadi dua bagian, rapat terbuka dan rapat tertutup.

Rapat terbuka (*Operbare Vergadering*) dihadiri oleh ribuan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), wakil pemerintah Hindia Belanda, dan *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID). Sedangkan pada rapat tertutup (*Besloten Vergadering*) hanya dihadiri oleh pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) saja. Rapat ini membahas mengenai asas Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibawa oleh

Sukarno, *Exorbitante Rechten* oleh Ishaq serta hak berkumpul, berserikat, mencetak dan menulis oleh Sartono. Sukarno menegaskan bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) harus memiliki tekad nasional, jiwa nasional dan tindakan nasional guna membangun kesatuan dan persatuan. Asas yang dicetuskan oleh Sukarno diantaranya adalah asas untuk berjuang dengan usaha sendiri (berdikari), tidak bekerjasama dengan kolonial, dan Marhaenisme.<sup>47</sup> Kongres pertama menghasilkan keputusan-keputusan penting seperti perubahan nama Perserikatan Nasional Indonesia menjadi Partai Nasional Indonesia, pengesahan cabang-cabang PNI diberbagai wilayah dan pembuatan media berupa surat kabar dengan nama Persatuan Indonesia.

Tanggal 18-20 Mei 1929 Partai Nasional Indonesia (PNI) mengadakan kongres yang kedua. Melalui pertemuan yang dilakukan, Partai Nasional Indonesia (PNI) mengupayakan untuk menentang segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat, memperjuangkan hak-hak rakyat serta berupaya untuk dapat mewujudkan tujuan dari berdirinya partai. Sukarno semakin percaya akan kemampuannya dalam mengurus partai untuk berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk bangsa.

Semangat Sukarno dalam mewujudkan cita-cita bangsa semakin membara, pergerakan-pergerakan menuju persatuan Indonesia semakin besar, berbagai kalangan di Hindia Belanda kini bangkit. Partai Nasional Indonesia (PNI) membangunkan rasa cinta tanah air serta mengemukakan kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan dalam persatuan.<sup>48</sup> Radikalisme yang ditunjukan

---

<sup>47</sup> Aji, Sumarno, Hermawan dan Eko Satriya, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900-1945 dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme. Surabaya: Unesa University Press, 2020, hlm. 70.

<sup>48</sup> Ir. Sukarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1. Yayasan Bung Karno. 2019, hlm. 118.



pada kongres-kongres semakin mempertegas aliran organisasi yang semakin nasionalis dan beranggapan bahwa kemunduran dari berbagai aspek seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya di Hindia Belanda merupakan sebab dari Kolonialisme dan Imperialisme yang dilakukan oleh Belanda.<sup>49</sup>

Partai Nasional Indonesia (PNI) mulai melancarkan perjuangannya melalui Sukarno yang banyak melakukan orasi di khalayak ramai. Berbondong-bondong rakyat Hindia Belanda datang untuk menyaksikan orasi yang dilakukan oleh Sukarno, hingga akhirnya menimbulkan kecaman dari pemerintah Kolonial Belanda. Belanda khawatir tindakan yang dilakukan oleh Sukarno dapat memengaruhi rakyat sehingga persatuan dan perlawanan terhadap penjajahan akan dilakukan. De Graeff memberikan gagasan untuk memberikan peringatan terhadap Partai Nasional Indonesia (PNI) untuk menjaga ucapan dan perilakunya di muka umum. Hasilnya, Partai Nasional Indonesia (PNI) dibatasi pergerakannya dan Sukarno berada dalam pengawasan Belanda.

Perkembangan Partai Nasional Indonesia (PNI) semakin tinggi sehingga pengawasan serta kritikan yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda semakin kuat. Tersiar kabar bahwa partai Nasional Indonesia (PNI) akan menggulingkan kekuasaan Belanda pada tahun 1930, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat penangkapan terhadap tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 24 Desember 1929.

---

<sup>49</sup> Perdana, Yusuf dan A. Rinaldo, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022, hlm 62.

## **2.4 Penangkapan Sukarno dan Tokoh Partai Nasional Indonesia**

Semangat Sukarno dalam melakukan pidato-pidato terhadap masyarakat semakin besar. Pemerintah Kolonial Belanda mulai berhati-hati dan selalu mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh Sukarno. Desember 1929, Sukarno melakukan perjalanan untuk mengadakan rapat umum di Solo. Setelah rapat umum dilangsungkan, Sukarno akan tinggal di rumah Suyudi. Perjalanan yang dilakukan oleh Sukarno dan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) tidak berjalan mulus, ditengah perjalanan Sukarno dihadang oleh polisi Belanda dan ditangkap untuk kemudian dibawa ke penjara Banceuy. Penjara ini merupakan penjara tingkat rendah yang berdiri sejak abad ke-19. Lingkungannya yang kumuh, tidak tertata dan tua, terdiri dari dua sel yang dibagi menjadi sel untuk tahanan politik dan sel untuk rakyat biasa. Sel yang hanya 1,5 meter , gelap dan lembab.

Pemerintah Kolonial Belanda menangkap Sukarno dan beberapa tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) seperti Gatot, Maskun dan Supriadinata. Penggeledahan diseluruh wilayah Jawa sehingga 40 orang anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan ribuan orang yang dicurigai turut ditahan. Belanda berasumsi bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) akan melakukan pemberontakan pada tahun 1930. Karena Sukarno tidak merasa akan melakukan pemberontakan, Sukarno membantah pernyataan tersebut dan beranggapan bahwa fitnah yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda hanya untuk melemahkan pengaruh Sukarno di Partai Nasional Indonesia (PNI).

Kitab hukum Belanda menyebutkan bahwa segala bentuk kebencian dan permusuhan baik melalui lisan atau tulisan, baik dilakukan terang-terangan atau

diam-diam, segala bentuk kegiatan yang menghasut banyak orang untuk melakukan kekacauan dan pemberontakan terhadap Belanda dapat dikenakan hukuman selama tujuh tahun penjara.<sup>50</sup> Sukarno dan beberapa rekan lainnya ditahan tanpa dapat berhubungan dengan dunia luar. Tidak diperbolehkan menerima tamu, tidak diperbolehkan menerima dan mengirimkan surat. Sukarno diinterogasi setiap hari selama tiga bulan. sementara Sukarno dan beberapa tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) lainnya berada dalam penjara, Partai Nasional Indonesia (PNI) diambil alih oleh Sartono dan Anwari.

Surat kabar yang memuat pidato Gubernur Jenderal membuka sidang *Volksraad* dan kabar bahwa Sukarno akan diadili mulai disebar luaskan. Tanggal dari pengadilan sudah ditetapkan, Sukarno mendapatkan tinta dan kertas dari rumah, kaleng yang menjadi wadah dalam buang air besar dan buang air kecil menjadi pengganti meja yang tidak tersedia di dalam sel. Setiap malam selama 1,5 bulan Sukarno mengangkat kaleng itu keatas tempat tidur dan kemudian mulai duduk bersila. Diletakkannya kertas tebal yang sebelumnya didapatkan dari rumah dan mulai menyusun pembelaan berjudul “Indonesia Menggugat”. Sukarno menjelaskan secara rinci seluruh penderitaan yang dirasakan oleh bangsanya selama 350 tahun atas jajahan Belanda.<sup>51</sup> Kemudian Sukarno menghadap ke pengadilan pada tanggal 18 Agustus 1930 atas tuduhan melanggar pasal 169, 161, 171 dan 153 KUHP mengenai pencegahan penyebaran rasa benci.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018, hlm. 109.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

Peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan mencerminkan penerapan teori proses politik dari Wiranata, penjelasan mengenai dinamika perjuangan politik yang berlangsung melalui konflik, tindakan kolektif dan respon terhadap penindasan<sup>53</sup> yang dilakukan oleh Kolonial melahirkan pemberontakan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1926-1927, pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan penangkapan Sukarno hingga lahirnya Pledoi Indonesia Menggugat menjadi bentuk nyata dari aksi kolektif secara hukum dan politik. Penangkapan Sukarno dan penyusunan Pledoi Indonesia Menggugat menunjukkan adanya reaksi terhadap penindasan yang dilakukan Kolonial, dimana ekspresi politik yang dihasilkan adalah berupa pembelaan hukum yang kuat. Perjuangan hukum seperti Pledoi Indonesia Menggugat merupakan bentuk dari artikulasi politik yang tidak hanya berada dalam konteks lembaga formal, akan tetapi sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Kolonial yang meminggirkan keadilan hukum bagi rakyat.

---

<sup>53</sup> Wiranata, dkk. Pemetaan Teori-Teori Gerakan Sosial-Contoh Kasus di Berbagai Negara. Airlangga University Press, 2022, hlm 4.